

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BANTUAN PROVINSI, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI

Alfina Fadhila Soesilo

fdlalfina@gmail.com

Nur Fadrijh Asyik

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of Local-owned Source Revenue, Province aids and Special Allocation Fund on Capital Expenditure with economy growth as intervening variable. The research was quantitative. Moreover, the data collection technique used purposive sampling. Furthermore, the instrument used documentation. Additionally, the data were taken from the Realization Report of Regional Government Budget. In line with, there were 63 samples. In addition, the data analysis technique used multiple and interaction regression. The research result concluded that Local-owned Source Revenue had a positive effect on Capital Expenditure. This meant, the higher the Local-owned Source Revenue was, and the higher The Capital Expenditure would be. On the other hand, province aids did not effect Capital Expenditure. In other words, allocation of Capital Expenditure was not affected by number of aids which were given by the Province Government. In contrast, Specific Allocation Fund had a positive effect on Capital Expenditure. It meant, allocation of Capital Expenditure was affected by the Government funds. While, economy growth could not intervene the effect of Local-owned Source Revenue on Capital Expenditure. Meanwhile, the growth could intervene the effect of Local-owned Source Revenue on Capital Expenditure.

Keywords: local-owned source revenue, province aids, special allocation fund, capital expenditure, economy growth

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, bantuan provinsi, dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria. Teknik pengumpulan pada penelitian ini adalah dokumentasi, dengan cara mengumpul data-data Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari BPKAD. Sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 63 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dan regresi interaksi (MRA). Hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, artinya semakin besar pendapatan asli daerah yang didapatkan maka semakin besar pula belanja modal. Bantuan provinsi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, artinya pengalokasian belanja modal tidak dipengaruhi oleh besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal, artinya pengalokasian belanja modal dipengaruhi oleh dana yang diberikan pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh bantuan provinsi terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, bantuan provinsi, dana alokasi khusus, belanja modal, pertumbuhan ekonomi.

PENDAHULUAN

Dengan adanya perubahan politik dan administrasi di Indonesia membuat perubahan bentuk pemerintahan yang dulunya sentralis menjadi struktur pemerintahan yang

terdesentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan pemerintahan, dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (daerah otonom) yang berlaku di Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Adanya Pelaksanaan Otonomi Daerah menyebabkan daerah tidak sepenuhnya bergantung dengan Pemerintah Pusat di Jakarta. Dengan Otonomi daerah diharapkan agar Pemerintah daerah setempat untuk bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Masing-masing daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda dalam mendanai kegiatan-kegiatan pemerintahannya. Tujuan dari Otonomi Daerah adalah mempercepat jumlah dan kualitas layanan umum di berbagai sektor, meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah otonom, dan daya saing daerah yang cukup kuat.

Meningkatkannya pelayanan umum di berbagai sektor terutama sektor publik diharapkan mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diharapkan Otonomi Daerah dapat membangun daerah dengan maksimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Jaya dan Dwiranda, 2014:80). Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2005) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (Kabupaten dan Kota) terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal. Nanga (2005) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.

Resiko dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus berusaha menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah yang menjelaskan bahwa PAD ialah sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang berdasarkan atas kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Jaeni dan Anggana (2016) menyatakan Pendapatan Asli Daerah masih memiliki peran yang relatif kecil dalam struktur keuangan daerah, oleh karena itu anggaran daerah khususnya anggaran di Kabupaten/Kota masih bergantung dengan dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat yaitu dana perimbangan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pemerintah pusat memiliki program upaya untuk mengurangi ketimpangan daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut di alokasikan dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adanya alokasi dari DAK diharapkan dapat mempengaruhi Belanja Modal, karena cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.

Menurut Jaeni dan Anggana (2016) Bantuan Keuangan Provinsi ialah bantuan tidak langsung yang dialokasikan dari Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten/Kota maupun Pemerintahan Desa di wilayahnya dengan tujuan mengurangi kesenjangan antara Kabupaten/Kota yang ada diwilayah nya, hal tersebut merupakan bentuk dalam proses mendukung desentralisasi yang sekarang berlaku. Untuk meningkatkan pengalokasian Belanja Modal, harus mengetahui terlebih dahulu variabel-variabel yang berpengaruh untuk meningkatkan Belanja Modal, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan, serta Bantuan Keuangan Provinsi yang merupakan bagian dari Transfer Pemerintah Provinsi.

Menurut Permanasari (2013) pertumbuhan ekonomi adalah suatu perkembangan yang berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertumbuh sehingga meningkatkan suatu kemakmuran masyarakat. Besarnya pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada masing-masing daerah dapat memperlemah maupun memperkuat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Di dalam pemerintah daerah merupakan level dengan skala mikro yang berfokus pada pendapatan daerah, sedangkan untuk pertumbuhan Ekonomi merupakan level dengan

skala makro, sehingga menjadikan aktifitas suatu daerah ikut berdampak dan saling berkaitan. Oleh karena itu Pertumbuhan Ekonomi ditambahkan menjadi variabel pemoderasi.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, (2) apakah Bantuan Provinsi berpengaruh terhadap Belanja Modal, (3) Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, (4) apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasi, (5) apakah Bantuan Provinsi berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasi, (6) apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasi.

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada: (1) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, (2) Untuk menguji pengaruh Bantuan Provinsi terhadap Belanja Modal, (3) untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, (4) untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Pemoderasi, (5) untuk menguji pengaruh Bantuan Provinsi terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Pemoderasi, (6) untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Pemoderasi.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Jansen dan Meckling (1976:5) menyatakan bahwa hubungan keagenan ialah sebuah persetujuan diantara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal. Dua pihak yang melakukan kontrak dalam *agency theory* (prinsipal-agen) biasanya berada dalam situasi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*), artinya bahwa agen mempunyai lebih banyak mempunyai informasi mengenai perusahaan daripada prinsipal dan diasumsikan bahwa individu - individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri (Asyik, 2010). Sedangkan pihak prinsipal akan membuat suatu kontrak, dengan harapan akan melakukan pekerjaan seperti apa yang diperintahkan oleh prinsipal. Dimana dalam hal tersebut terdapat adanya pendelegasian wewenang.

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk menjalankan dan menangani sendiri kegiatan pemerintahan dan kebutuhan masing-masing masyarakat setempat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam artian bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahannya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran, serta prakarsa pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Widjaja, 2017:133).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 8 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa APBD merupakan rencana keuangan pemerintahan daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh DPRD . APBD pada dasarnya merupakan salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat guna meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Sukmawati *et al.*, (2016:4) menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan sutau daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengeolaan Kekayaan Daerah, yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Bantuan Provinsi (BP)

Bantuan provinsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bantuan Keuangan Provinsi yang menurut Jaeni dan Anggana (2016) Bantuan Keuangan Provinsi adalah Belanja Tidak Langsung yang diberikan kepada Kabupaten/Kota maupun Pemerintahan Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi guna mengurangi kesenjangan antara Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya. Bantuan Keuangan akan diberikan pada desa-desa secara bertahap di wilayah Kabupaten/Kota yang tersebar di Jawa Timur. Pemberian Bantuan Keuangan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa Dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang menjelaskan bahwa untuk mendanai kegiatan khusus yang bisa meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah dengan memberdayakan Pemerintah Desa melalui dukungan pendanaan, maka perlu diberikan bantuan Keuangan Desa.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Peraturan Pemeritah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Renyowijoyo (2010:174) DAK dapat digunakan untuk: (1) mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, (2) mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

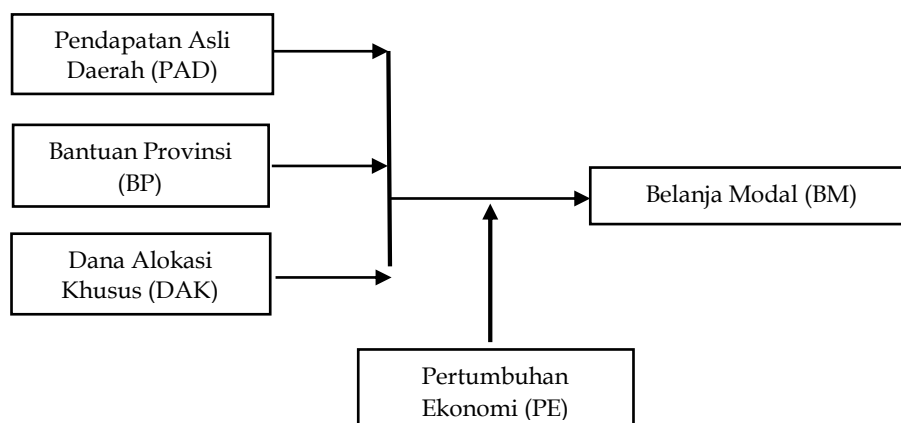
Belanja Modal (BM)

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal adalah belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset/kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Aset tetap merupakan salah satu penunjang untuk memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2011:331). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan suatu daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD dirancang sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan daerah, yang dapat diartikan bahwa pemerintah daerah akan mengalokasikan Belanja Modal maka harus disesuaikan dengan jumlah PAD yang diterima. Oleh karena itu besar kecilnya Belanja Modal tergantung dengan jumlah PAD yang diterima. Permatasari (2015) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Bantuan Provinsi terhadap Belanja Modal

Capaian pembangunan suatu provinsi dipengaruhi oleh keberhasilan Pembangunan pada wilayah Kabupaten/Kota, dikarenakan ukuran keberhasilan dari pembangunan suatu provinsi dihitung menurut tingkat pertumbuhan Kabupaten/Kota yang ada diwilayahnya, oleh sebab itu sudah sewajarnya Pemerintah Provinsi melakukan pemerataan pembangunan diwilayahnya dengan mengalokasikan dana transfer kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk dana transfer atau dana perimbangan. Transfer dari Provinsi tentu sangat membantu pembangunan wilayah dalam belanja APBD yang diakomodir dalam Belanja Modal karena persyaratan digunakan untuk pembangunan secara fisik. Penelitian yang dilakukan oleh Jeani dan Anggana (2016) juga menyatakan bahwa Bantuan Provinsi berpengaruh pada Belanja Modal. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Bantuan Provinsi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Pemanfaatan DAK dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik dengan harapan dapat meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan seharusnya Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Alokasi Belanja Pembangunan Infrastruktur lebih tinggi karena adanya dana yang berasal dari

DAK tersebut yang akan berimbas pada peningkatan pengalokasian belanja untuk fisik yang pada APBD dialokasikan pada jenis Belanja Barang Modal. Berdasarkan penelitian Husni (2011) menunjukkan bahwa DAK berkontribusi signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan gambaran hipotesis diatas dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₃: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pembangunan Daerah dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi yang baik disuatu daerah. Pembangunan daerah yang baik yaitu meningkatkan sarana dan prasarana publik dan infrastruktur daerah. Apabila pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur dapat meningkatkan PAD, hal tersebut juga mempengaruhi alokasi belanja modal, karena sarana dan prasarana serta infrastruktur daerah dibelanjakan menggunakan belanja modal. Pada penelitian Jaeny dan Anggana (2016) membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi PAD terhadap Belanja Modal. Berdasarkan gambaran hipotesis diatas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₄: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Bantuan Provinsi Terhadap Belanja Modal

Pembangunan Daerah dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi yang baik disuatu daerah. Menurut Jaeni dan Anggana (2016) keberhasilan dari pembangunan suatu provinsi dihitung menurut tingkat pertumbuhan Kabupaten/Kota. Dengan meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi seharusnya dapat meningkatkan sumber dana dan Belanja Modal. Dana transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan suatu daerah, sehingga juga bisa meningkatkan Belanja Modal. Dimana Belanja Modal akan digunakan untuk keperluan suatu daerah. Dari uraian diatas maka dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H₅: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Pengaruh Bantuan Provinsi terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah harusnya dapat meningkatkan sumber dana dan belanja modal. Adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal, karena DAK akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah untuk pelayanan publik. Pada penelitian Hidayati (2016) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi DAK terhadap Belanja Modal. dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek Penelitian)

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Objek penelitian yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2019.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*, yaitu dengan kriteria pemilihan sampel-sampel tertentu agar sampel yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Laporan Realisasi APBD tahun 2017-2019, (2) Data Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) tahun 2017-2019, (3) Kabupaten/Kota yang mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi berturut turut dari Tahun 2017-2019. Berdasarkan kriteria diatas, maka peneliti akan menggunakan 21 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dan data yang diambil selama 3 tahun, maka total sampel keseluruhan adalah 63.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengumpulkan data sekunder baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011:114). Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Bebas (*Independent Variabele*)

Menurut Rohmah (2019) Variabel Bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif maupun negatif untuk variabel dependen nantinya.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Warsito (2001:128) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pendapatan dari daerah lainnya yang sah. PAD berfungsi untuk memenuhi dan memuaskan kepentingan umum. Fungsi ini dicapai melalui program-program pemerintah daerah yang modalnya dari PAD. Menurut Prabawati dan Wany (2017) nilai indikator variabel PAD diukur dengan:

$$\text{PAD} = \text{Pendapatan Pajak Daerah} + \text{Pendapatan Retribusi Daerah} + \text{Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah}$$

Bantuan Provinsi

Berdasarkan Jaeni dan Anggana (2016) Bantuan Keuangan Provinsi ialah belanja tidak langsung yang diberikan kepada Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa di Wilayahnya oleh Pemerintah Povinsi dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan antara Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya. Bantuan ini mencakup Belanja Bantuan Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pendidikan, Rehabilitasi Lahan Kritis. Kriteria menurut Pergub No 8 Tahun 2016 adalah Pemerintah Desa mengusulkan permohonan bantuan kepada Gubernur Jawa Timur dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Kepala Desa disertai foto lokasi kondisi 0%.

Dana Alokasi Khusus

Menurut Halim (2009) bahwa Dana Alokasi Khusus ialah alokasi dari APBN kepada Provinsi atau Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan disebutkan bahwa perhitungan DAK adalah sebagai berikut:

$$KU = (PAD + DAU + DBH - DBRDR) - \text{Belanja Gaji PNSD}$$

Keterangan:

Kemampuan Keuangan Daerah = Penerimaan Umum APBD – Belanja Pegawai Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Khusus

DBH : Dana Bagi Hasil

DBRDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

PNSD : Pegawai Negeri Sipil Daerah

Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel Terikat adalah variabel yang tidak bebas yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Menurut Ghazali (2006:6) variabel terikat bertujuan untuk menentukan apakah variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat secara individual maupun secara bersama. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal.

Belanja Modal

Berdasarkan pendapat Syaiful (2006) bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memelihara ataupun menambah aset tetap. Belanja Modal pada penelitian ini dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018. Menurut Nugroho dan Rohman (2012) adapun rumus perhitungan untuk Belanja Modal adalah sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigrasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap} + \text{Belanja Aset lainnya}$$

Variabel Moderator (*Moderating Variable*)

Menurut Sugiyono (2011) variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Adapun variabel Moderator yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prabawati dan Wany (2017) Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat di indikasi dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Ekonomi suatu negara dapat dikatakan tumbuh apabila pendapatan perkapita masyarakat meningkat dari waktu ke waktu. Menurut Prabawati dan Wany (2017) Pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

TEKNIK ANALISIS DATA

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata rata (*mean*), *minimum*, *maximum*, dan standar deviasi. Rata-rata (*mean*) digunakan untuk mengetahui rata-rata yang bersangkutan, minimum digunakan untuk mengetahui

jumlah terkecil dari data yang bersangkutan, maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar dari data yang bersangkutan, standar deviasi untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan Uji Normalitas menurut Ghazali (2018) adalah untuk menguji apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang terdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan *plotting* data residual akan dibandingkan dengan dengan garis diagonal. Apabila distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dasar pengambilan keputusan atas Uji Normalitas adalah apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, apabila $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2018) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan dengan adanya korelasi antar variabel bebas/*independen*. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat terdeteksi dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Varian Inflation Factor*), apabila nilai VIF dibawah 10 dan nilai tolerance diatas 0,1 hal tersebut menandakan bahwa data bebas multikolinearitas. Apabila nilai VIF diatas 10 dan nilai *tolerance* dibawah 0,1 hal tersebut menandakan bahwa data tidak bebas dari multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2018) tujuan Uji Autokorelasi ialah untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik ialah regresi yang terbebas dari autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2018) tujuan Uji Heteroskedastisitas ialah untuk menguji apakah suatu model regresi terjadi ketidak samaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk dapat melihat ada atau tidak nya Heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik *Scatterplot*. Dasar analisis yang digunakan adalah apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah mengindikasikan terjadi Homoskedastisitas. Dan apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam menguji hipotesis yang diajukan, metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi berganda dan regresi interaksi. Menurut Ghazali (2006) uji interaksi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur intraksi (perkalian dua atau lebih variabel independen).

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 BP + \beta_3 DAK + \beta_4 PE + \beta_5 PAD*PE + \beta_6 BP*PE + \beta_7 DAK*PE + e$$

Keterangan:

BM : Belanja Modal

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$: Koefisien Regresi
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 BP : Bantuan Provinsi
 DAK : Dana Alokasi Khusus
 PE : Pertumbuhan Ekonomi

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien yang dimiliki adalah terletak pada 0-1. Klasifikasi koefisien korelasi yaitu, 0 (tidak ada korelasi), 0-0,49 (korelasi lemah), 0,50 (korelasi moderat), 0,51-0,99 (korelasi kuat), 1,00 (korelasi sempurna). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Uji F (*Goodness of fit*)

Menurut Ghozali (2018) jika uji f memiliki nilai signifikan sebesar $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Apabila $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tujuan Uji t adalah untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Ghozali (2018) menyatakan jika nilai signifikan $< 0,05$, maka dapat diartikan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur berada di bagian timur Pulau Jawa Indonesia, membentang antara $111^{\circ} 0' \text{ BT} - 114^{\circ} 4' \text{ BT}$ dan $7^{\circ} 12' \text{ LS} - 8^{\circ} 48' \text{ LS}$. Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah daratan sebesar 88,70% atau luas wilayah sebesar 5.422 km². Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota, sehingga keseluruhan Kabupaten dan Kota di Jawa Timur berjumlah 38. Jawa Timur memiliki jumlah Kabupaten/Kota terbanyak di Indonesia.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Dari pengumpulan data mengenai Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2019, maka hasil analisis SPSS tentang statistik deskriptif yang meliputi *minimum*, *maximum*, *mean*, dan *standar deviation* untuk variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif
(Dalam Ribuan)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	63	94657893.00	5381857154.00	586660922.1111	1054103073.05027
BP	63	716850.00	182470486.00	23524573.5079	33916350.26105
DAK	63	22015825.00	595626071.00	286012561.7937	138093222.50235
BM	63	114677681.00	2754304824.00	477167048.6667	501376186.31544
PE	63	.04	.12	.0592	.01388
Valid N (listwise)	63				

Sumber : Data Sekunder diolah, 2021

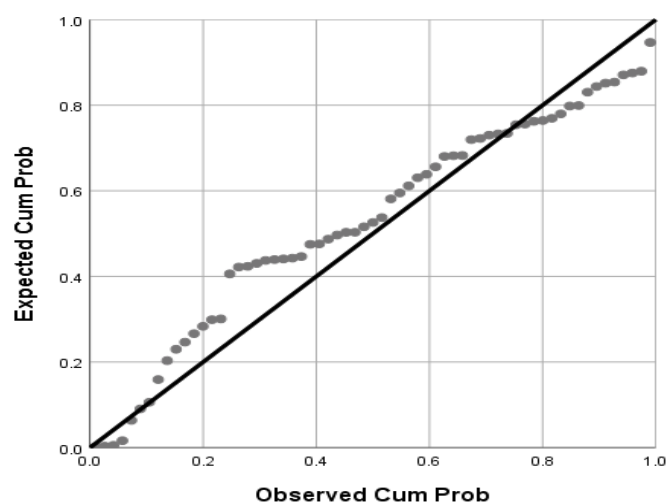
Berdasarkan hasil statistik deskriptif diatas, maka dapat dijelaskan bahwa PAD memiliki nilai minimum sebesar 94.657.893 893 yang diperoleh Kabupaten Ngawi tahun 2018. Nilai maksimum sebesar 5.381857.154 yang diperoleh Kota Surabaya tahun 2019. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) pada periode 2017-2019 adalah sebesar 586.660.992,11, dan nilai standar deviasi sebesar 1.054.103.073.

Bantuan Provinsi memiliki nilai minimum sebesar 716.850 yang diperoleh Kota Madiun pada tahun 2017. Nilai Maksimum sebesar 182.470.486 yang diperoleh Kabupaten Bondowoso pada tahun 2018. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) pada periode 2017-2019 adalah sebesar 23.524.573,50 dan nilai standar deviasi sebesar 33.916.350,26. Dana Alokasi Khusus memiliki nilai minimum sebesar 22.015.825 yang diperoleh Kota Mojokerto pada tahun 2017. Nilai maksimum yaitu sebesar 595.626.071 yang diperoleh Kabupaten Malang pada tahun 2019. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) pada periode 2017-2019 adalah sebesar 286.012.561, dan nilai standar deviasi sebesar 138.093.222,50.

Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar 114.677.681 yang diperoleh Kota Kediri pada tahun 2018. Nilai Maksimum pada Belanja Modal sebesar 2.754.304.824 yang diperoleh Kota Surabaya pada tahun 2019. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 477.167.048 dan nilai standar deviasi sebesar 501.376.186,31. Pertumbuhan Ekonomi nilai minimum sebesar 0,04 yang diperoleh Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017. Nilai maksimum pada Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,12 yang diperoleh Kabupaten Lamongan pada tahun 2019. Pertumbuhan Ekonomi pada penelitian ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,59, sedangkan untuk standar deviasi sebesar 0,013.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dapat dikatakan normal apabila membentuk satu garis lurus diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.



Gambar 2
Grafik *Normal Probability Plot*
Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Selain menggunakan uji grafik, uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov*. Dikatakan normal apabila nilai $Asymp. Sig > sig$ 5% (0,05). Hasil pengujian menggunakan *Kolmogrov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>	
N		63	
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000001	
	<i>Std. Deviation</i>	98077.791445	
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.163	
	<i>Positive</i>	.091	
	<i>Negative</i>	.163	
<i>Test Statistic</i>		.163	
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^c	

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Uji Multikolinearitas

Apabila nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10, maka dapat dikatakan terbebas dari Multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		<i>Collinearity Statistics</i>		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	263.732	792.810		.153	.879		
	PAD	.536	.206	1.128	2.600	.002	.244	2.808
	BP	-.568	2.052	-.038	-.277	.783	.151	1.323
	DAK	.610	.546	.168	1.118	.001	.394	4.089
	PADPE	1.660	3.497	.207	.475	.045	.295	2.889
	BPPE	11.644	32.549	.045	.322	.755	.136	2.569
	DAKPE	.358	8.933	.007	.040	.006	.224	3.317
	PE	208.668	528.958	.007	.104	.022	.257	2.763

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3 yang menunjukkan hasil Uji Multikolinearitas, menunjukkan bahwa besarnya nilai *tolerance* $\geq 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 . Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model penelitian ini.

Uji Autokorelasi

DW test dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai DW hitung (d) dengan nilai dL dan dU pada tabel *Durbin-Watson*. Jika nilai yang didapatkan pada angka -2 sampai +2 maka model regresi dinyatakan terbebas dari autokorelasi. Hasil Uji Autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

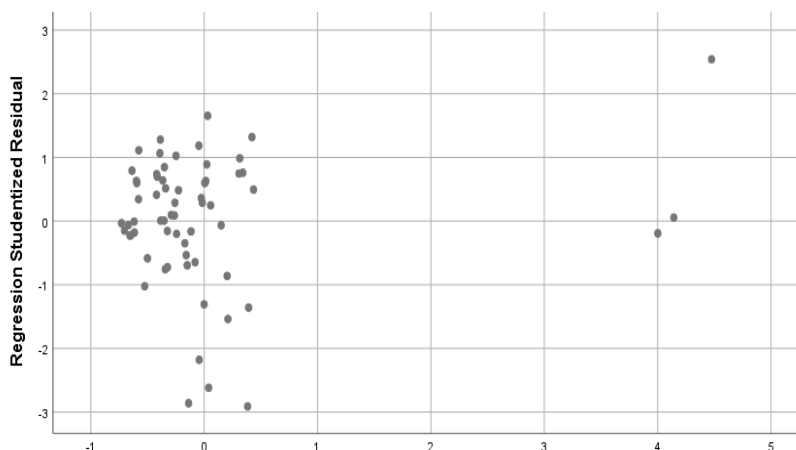
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.960 ^a	.943	.926	104818414.34493	1.759

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Pada Tabel 4 diatas besarnya Durbin-Watson adalah 1,759. Berdasarkan ketentuan diatas, nilai DW yang dihasilkan terletak antara -2 sampai +2 maka dapat dikatakan bahwa model regresi terbebas dari Autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa keberadaan titik plot menyebar atau tidak mengumpul membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa terbebas Heteroskedastisitas, sehingga model layak dipakai.

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi (R²) yang dimiliki adalah 0-1, apabila semakin mendekati 1, maka menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan semakin kuat, sedangkan apabila mendekati 0, maka menunjukkan pengaruh yang diberikan lemah. Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,960 diatas 0,5 sehingga menunjukkan bahwa PAD, BP, DAK memiliki pengaruh yang kuat dalam menjelaskan Belanja Modal (BM) dengan di moderasi Pertumbuhan Ekonomi (PE). Dapat diketahui pula besarnya R² yang diperoleh sebesar 0,943 atau 94,3%. Dari hasil tersebut memberikan arti bahwa BM dipengaruhi oleh PAD, BP, DAK, PAD*PE, BP*PE, dan DAK*PE sebesar 94,3%, sedangkan sisanya sebesar 5,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor variabel lain.

Uji F

Digunakan untuk mengetahui apakah variabel PAD, BP, DAK, dan PE memiliki pengaruh terhadap BM, maka dilakukan pengujian Uji F, ketentuan signifikansi adalah sebesar 0,05. Apabila nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka dikatakan tidak Fit yang bermakna tidak ada pengaruh secara positif. Apabila nilai probabilitas $\leq 0,05$ maka dikatakan Fit yang bermakna memiliki pengaruh secara positif. Hasil Uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Hasil Uji Statistik F
 ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	149.000	7	214.000	124.543	.001 ^b
	Residual	604.000	55	109.000		

Total	155.000	62
-------	---------	----

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh hasil Uji F dengan nilai signifikansi $0,001 \leq 0,05$ yang berarti mode regresi tersebut layak dan menunjukkan pengaruh yang signifikan. Diketahui Koefisien F sebesar 124,543, dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan pengaruh variabel independen, dependen, dan moderasi.

Uji Hipotesis (uji t)

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dijelaskan dari hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut bahwa Dari hasil Uji t dapat diketahui bahwa tingkat signifikan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar $0,002 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang bermakna terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM).

Dapat dilihat bahwa tingkat signifikan variabel Bantuan Provinsi (BP) sebesar $0,783 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak, yang bermakna tidak ada pengaruh Bantuan Provinsi (BP) terhadap Belanja Modal (BM).

Diketahui bahwa tingkat signifikan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar $0,001 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima, yang bermakna terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal (BM).

Dapat dilihat bahwa tingkat signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebagai pemoderasi sebesar $0,045 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima, yang bermakna bahwa PE dapat memoderasi PAD terhadap BM.

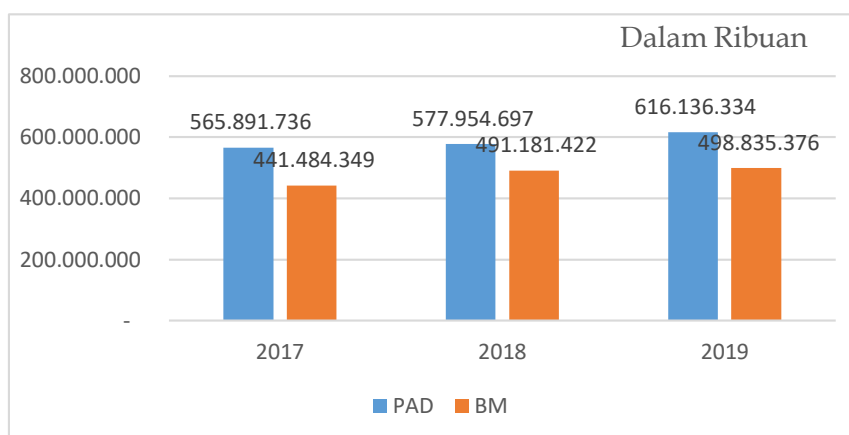
Dari hasil Uji t dapat diketahui bahwa tingkat signifikan Bantuan Provinsi (BP) terhadap Belanja Modal (BM) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebagai pemoderasi sebesar $0,755 > 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_5 ditolak, yang bermakna bahwa PE tidak dapat memoderasi BP terhadap BM.

Dari hasil Uji t dapat dilihat bahwa tingkat signifikan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal (BM) dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi sebesar $0,006 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_6 diterima, yang bermakna bahwa PE dapat memoderasi DAK terhadap BM.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 3, menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikan 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula Belanja Modal (BM). Pemanfaatan PAD yang baik serta di ikuti dengan usaha-usaha peningkatan PAD maka akan meningkatkan Belanja Modal dalam daerah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 4
Diagram PAD dan BM
 Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Dari diagram di atas disimpulkan bahwa, apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, maka pengalokasian Belanja Modal juga meningkat. Pada tahun 2017 rata-rata PAD sebesar 565.891.736 dan rata-rata Belanja Modal pada tahun 2017 sebesar 441.484.349. Pada tahun 2018 PAD mengalami kenaikan dan hal serupa juga dialami oleh BM. Begitu pula pada tahun 2019 PAD mengalami peningkatan, hal tersebut juga dialami oleh BM. Berdasarkan analisis deskriptif pada Tabel 1, PAD memiliki nilai rata-rata untuk tahun 2017-2019 sebesar 586.660.922,11, dan BM memiliki nilai rata-rata sebesar 447.167.048,66. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa besarnya PAD mempengaruhi besarnya Belanja Modal. Kabupaten/Kota pada penelitian ini bergantung pada PAD dalam membelanjakan pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun yang berguna dalam sarana dan prasarana publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Permata (2016) dan Abba *et al.*, (2015) yang membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Demikian pula penelitian yang dilakukan Permatasari (2015) yang menunjukkan hasil positif.

Pengaruh Bantuan Provinsi Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 3, menunjukkan bahwa Bantuan Provinsi (BP) memiliki nilai signifikan 0,783 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa H_2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Bantuan Provinsi (BP) tidak memengaruhi besarnya Belanja Modal (BM). Pada tabel 1 pada tahun 2017-2019 BP memiliki nilai rata-rata sebesar 23.524.573 sedangkan BM memiliki nilai rata-rata sebesar 477.167.048,66. Dari rata-rata BP dan BM yang sangat jauh berbeda, maka dapat disimpulkan kontribusi yang diberikan BP relatif kecil terhadap BM.

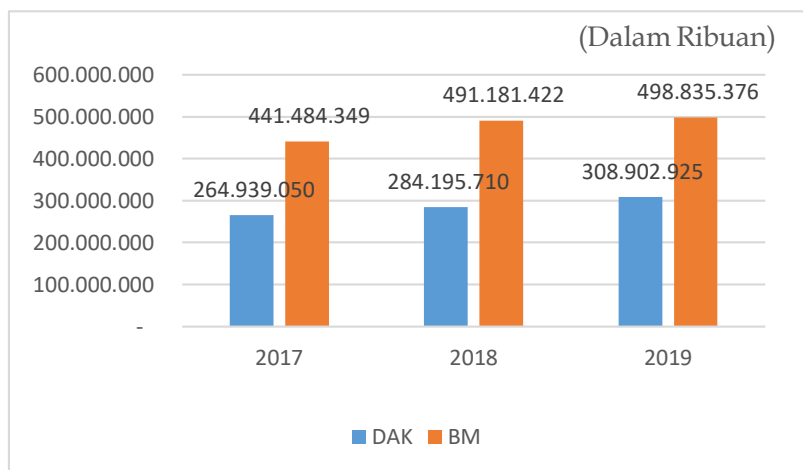
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bantuan Provinsi tidak mempengaruhi Belanja Modal sehingga lebih digunakan untuk belanja lainnya seperti Belanja Operasional yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015.

Bantuan Keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat umum penggunaan dan peruntukkannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah di Desa, jadi dapat digunakan untuk pembangunan ataupun untuk kebutuhan lainnya seperti infrastruktur desa atau tunjangan kepala desa dan perangkat desa yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, pengelolaan

dan peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat Jawa Timur.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 3 yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi bantuan dari pusat berupa DAK maka semakin tinggi pula besarnya Belanja Modal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diagram dibawah ini:



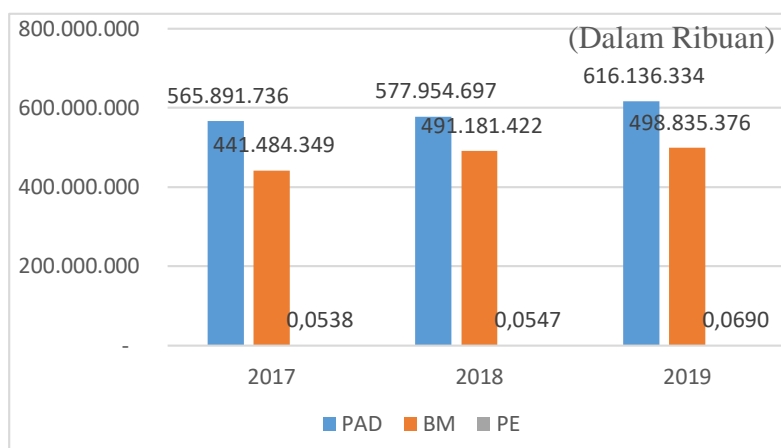
Gambar 5
Diagram DAK dan BM
 Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Dari diagram diatas dapat disimpulkan apabila Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan maka Belanja Modal juga akan mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 rata-rata DAK sebesar 264.939.050 dan BM sebesar 441.484.349. Pada tahun 2018 DAK mengalami kenaikan, hal tersebut juga dialami oleh BM. Pada tahun 2019 DAK mengalami kenaikan yang dialami pula oleh BM. Rata-rata DAK untuk tahun 2017-2019 sebesar 286.012.561,79 dan rata-rata BM di tahun 2017-2019 sebesar 477.167.048,66. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa DAK memiliki peran dalam mempengaruhi besarnya BM. Hal ini bermakna apabila DAK meningkat maka BM juga meningkat. Hal ini berarti Dana Alokasi Khusus lebih banyak dialokasikan ke Belanja Modal yang digunakan dalam pembangunan sarana prasarana suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayati (2016) yang menyatakan bahwa Dana Lokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jaeni dan Anggana (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal (BM). Hal ini dapat diketahui dengan adanya hasil signifikan sebesar 0,045 yang lebih kecil dari 0,05 dengan begitu H_4 diterima. Bahwa tingkat Pertumbuhan Ekonomi dinyatakan dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dapat dilihat dari diagram dibawah ini:



Gambar 6
Diagram PAD, BM, dan PE
Sumber: Data Sekunder diolah 2021

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga Belanja Modal. Pada tahun 2017 rata-rata PAD sebesar Rp 565.891.736, besarnya BM adalah 441.484.349 dan besarnya Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,0538. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, hal tersebut juga diikuti oleh PAD dan BM. Pada tahun 2019 Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan diikuti dengan PAD dan BM.

Berdasarkan tabel 1 PAD memiliki nilai rata-rata untuk tahun 2017-2019 sebesar 586.660.922,11 BM memiliki nilai rata-rata sebesar 477.167.048,66 sedangkan Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai rata-rata 0,0592. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan karena adanya keberhasilan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik didukung dengan adanya sarana prasarana serta infrastruktur yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi. Semakin tinggi Pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan, dengan begitu semakin tinggi pula pengalokasian dana untuk Belanja Modal.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah dapat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, dengan begitu tingkat produktivitas dan konsumsi masyarakat semakin meningkat. Maka secara keseluruhan kemampuan masyarakat semakin tinggi untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat meningkatkan sumber penerimaan daerah dan dapat meningkatkan penerimaan PAD. Penelitian Jaeni dan Anggana (2016) membuktikan bahwa adanya Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Bantuan Provinsi Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

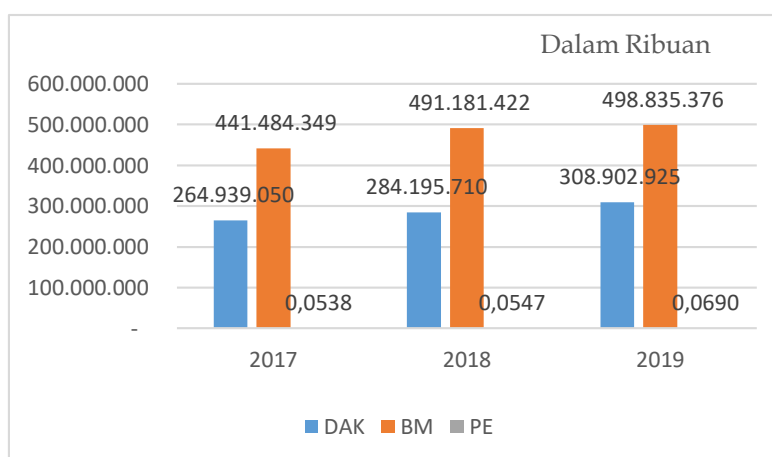
Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 3 menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi Bantuan Provinsi terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil signifikan 0,755 yang lebih besar dari 0,05 dengan artian bahwa H_0 ditolak.

Pada Tabel 1 dijelaskan bahwa nilai rata-rata untuk Bantuan Provinsi tahun 2017-2019 sebesar 23.524.573,50. Rata-rata untuk BM sebesar 477.167.048,66. Dan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0592. Tingkat pertumbuhan ekonomi dinyatakan tidak dapat memoderasi Bantuan Provinsi terhadap Belanja Modal. Hal ini bermakna bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak mempengaruhi besarnya Bantuan Provinsi yang diperoleh, semangat pemerataan dan stimulant bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi dasar

pengalokasian Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota. Apabila Bantuan Keuangan ini bersifat umum maka penggunaannya diatur oleh Desa Penerima Bantuan, apabila Bantuan Keuangan Bersifat Khusus maka penggunaannya diatur oleh Pemerintah Daerah Pemberi Bantuan. Bantuan Keuangan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan desa, dapat juga digunakan untuk penghasilan dan tunjangan perangkat desa. Oleh karena itu Pertumbuhan ekonomi tidak bergantung pada Bantuan Provinsi, karena Bantuan Provinsi itu sendiri digunakan untuk pembangunan desa dan atau penghasilan dan tunjangan perangkat desa.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Dari hasil uji t pada Tabel 3 menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dapat dilihat dengan nilai signifikan sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa H_0 diterima. Hal ini bermakna bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Kabupaten/Kota dapat memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Gambar 7
Diagram DAK, BM, dan PE
Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Dari diagram diatas dapat dilihat apabila Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan maka Dana Alokasi Khusus juga mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan pada Dana Alokasi Khusus maka pengalokasian dana untuk Belanja Modal juga meningkat. Belanja Modal digunakan untuk pengadaan sarana prasarana, infrastruktur serta fasilitas dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2017 DAK yang diperoleh sebesar 264.939.050 besarnya BM adalah 441.484.349 dan besarnya Pertumbuhan Ekonomi adalah 0,0538. Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan di tahun 2018 dan 2019, hal tersebut di ikuti pula oleh DAK dan BM.

Rata-rata DAK tahun 2017-2019 yang ada pada tabel 4 adalah sebesar 286.012.561,79. Rata-rata untuk BM sebesar 477.167.048. dan rata-rata untuk pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,0592. Apabila suatu daerah mengalami peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi, dengan begitu daerah tersebut terpacu untuk lebih meningkatkan alokasi Belanja Modal dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, merupakan alasan pemerintah daerah menggunakan Dana Alokasi Khusus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang direalisasikan melalui Belanja Modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati

(2016) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM), (2) Bantuan Provinsi (BP) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). (3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, (4) Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, (5) Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi Bantuan Provinsi terhadap Belanja Modal, (6) Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Saran

Saran untuk penelitian ini: (1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan objek penelitian lebih luas lagi, (2) Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti variabel yang jarang diteliti sebelumnya yang juga merupakan komponen dari APBD sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik atau model penelitian yang lebih baik, (3) Peneliti selanjutnya diharapkan menambah tahun periode untuk penelitian dengan tujuan dapat memberikan hasil yang akurat.

Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini adalah: (1) Data penelitian tidak menggunakan seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sehingga mengurangi jumlah sampel, (2) Sampel yang digunakan hanya berfokus pada Kabupaten/Kota yang mendapatkan PAD, BP dan DAK secara berturut dari tahun 2017-2019, (3) Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bantuan Provinsi (BP), dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan untuk dependen menggunakan 1 variabel yaitu Belanja Modal (BM). Dan untuk variabel moderasi menggunakan 1 variabel yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE).

DAFTAR PUSTAKA

- Abba, M., A. Bello, S. M. Aliyu. 2015. Expenditure and Internally Generated Revenue Relationship: An Analysis of Local Government in Adamawa State Nigeria. *International Rivereed Research Journal* 6(3):1.
- Adi, P. H. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Kritis Universitas Kristen Satya Wacana*. Salatiga.
- Asyik, N. F. 2010. Executive Stock Option Plans: Uji Pengelolaan Laba Selama Vesting Period. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 14(4): 478-500.
- Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ke Empat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2008. *Structural Equation Modelling*. Edisi Ke Dua. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 25*. Edisi Ke Sembilan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2009. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ke Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Husni, H. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Studi Empiris di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Skripsi*. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan

- Hidayati, N. 2016. Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap ALokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekoomi sebagai Moderasi. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Jaeni dan Anggana. 2016. Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Propinsi Terhadap Belanja Modal. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan* 5(1): 13-26.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Thoory of The Firm: Managerial, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360
- Jaya, P dan Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal* 7(1): 79-92. ISSN: 2302-8556.
- Nanga, M. 2005. *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Perdana. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Nugroho, F. dan A. Rohman. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Accounting* 1(2): 1-14.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang *Dana Perimbangan*.
 _____ . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
 _____ . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
 _____ . Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
 _____ . Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa Dari Pemerintah Daerah Povinsi Jawa Timur*.
- Permanasari, W. A. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011. *Artikel Publikasi*.
- Permata, Z. S. W. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Studi pada Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5(9).
- Permatasari, I. 2015. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntnasi (JIRA)* 5(1).
- Prabawati, P. S. S., dan E, Wany. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* 1-17
- Renyowijoyo, M. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Edisi Kedua. Penerbit Citra Wacana Media. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.
 _____ . Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.
 _____ . Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah*.
 _____ . Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.
 _____ . Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Rohmah, N. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten /Kota Se Jawa Timur Tahun 2013-2017. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(6).
- Sanusi, A. 2011. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sukirno, S. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- _____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sukmawati, R., I. W. Suwendra, dan F. Yudiantmaja. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaen Buleleng. *Jurnal Manajemen Indonesia* 4(1).
- Syaiful. 2006. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. http://file.upi.eduDiremktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/196510122001121-IKIN_SOLIKIN/JURNAL_PAD.pdf.
- Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.
- Widjaja. 2017. Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa. *Jurnal Konstitusi* 14(2): 351-3